

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, interaksi aktor berbentuk disosiatif sehingga mempengaruhi proses pembangunan dimana program pembangunan awning tidak bisa dilanjutkan kembali. Dalam interaksi disosiatif peneliti melihat pertentangan dan kontravensi yang cukup kuat, khususnya kontravensi yang terjadi di antara pemangku adat Kota Bukittinggi dijadikan sebagai kebaruan penelitian tentang interaksi aktor. Kontravensi ini dilatarbelakangi oleh tindakan-tindakan para aktor yang dinilai tidak tepat dengan ketentuan-ketentuan sehingga memicu desas-desus di kalangan pemangku adat Kurai Kota Bukittinggi.

Selain itu peneliti menemukan bahwa terdapat bentuk interaksi asosiatif yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat penentang pembangunan melalui akomodasi, dimana pada dasarnya mereka berupaya melakukan konsiliasi agar tercapai pemahaman yang sama, namun ternyata perundingan yang dilakukan melahirkan penafsiran-penafsiran yang saling bertolak belakang, seperti penafsiran dalam hal pemerintahan hingga hal-hal yang berkaitan dengan aspek kultural. Perbedaan penafsiran inilah yang semakin meningkatkan pertentangan di antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh sebab itu maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam sebuah kebijakan khususnya pembangunan, pemerintah memiliki kekuasaan eksekutif yakni melaksanakan keputusan yang sudah dibuat. Seharusnya jika program

apapun yang sudah masuk ke dalam RPJMD dan sudah disahkan anggaran oleh badan legislatif, tidak ada lagi yang bisa menghambat keputusan yang sudah dibuat. Dari temuan di lapangan DPRD menilai pemerintah belum memiliki kesiapan yang matang dalam perencanaan sehingga sebagai lembaga yang mengawasi peraturan DPRD menjadikan anggaran bersyarat sebagai cara untuk menjaga kestabilan khususnya dalam masyarakat. Di samping itu pemerintah mengganggu masukan yang diberikan DPRD dimana mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti melakukan kajian teknis dan sosiokultural.

Namun jika melihat pada aspek kekuasaan, sebuah kebijakan yang sudah disahkan seharusnya tidak lagi terikat akan ketentuan-ketentuan yang berada di luar *statement-statement* sebelumnya. Jika pemerintah Kota Bukittinggi sudah matang dalam aspek perencanaan dan mampu memperkuat legitimasi dan otoritasnya, maka diprediksi pembangunan dapat terus berjalan dan jika gejala berujung pada konflik, maka bukan lagi tanggungjawab pemerintah sebagai aktor eksekutor melainkan lembaga yudikatiflah yang dapat menangani masalah tersebut.

Ketika melihat pada kasus yang terjadi di Kota Bukittinggi, walaupun Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki hak-hak dalam kebijakan dan legitimasi, termasuk dalam melaksanakan pembangunan, gejala yang berasal dari masyarakat khususnya masyarakat Adat Kurai ternyata dapat mempengaruhi kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh Pemerintah sehingga sistem adat inilah yang mempengaruhi jalan atau tidaknya kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah beralasan bahwa mereka berupaya untuk menjaga kestabilan antara pemerintah

dengan masyarakat, khususnya pemangku adat. Namun di sisi lain terdapat alasan yang logis dimana ketika aspek kesiapan dalam perencanaan tidak terpenuhi dengan baik maka wajar saja program tersebut dapat dipatahkan sekalipun dengan masyarakat yang tidak memiliki kapasitas apapun dalam struktur kebijakan pemerintah.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dengan ini peneliti memberikan saran atau rekomendasi sehingga untuk peneliti berikutnya menjadi lebih jelas lagi dalam mengkaji interaksi aktor.

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih untuk penelitian selanjutnya dalam aspek sosiopolitik mengenai konsep interaksi aktor. Untuk kedepannya peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjut mengenai solusi atau resolusi konflik terhadap interaksi yang mengarah pada bentuk disosiatif yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat.

Bagi kajian interaksi aktor diharapkan akan memperluas kembali hubungan-hubungan yang terjadi khususnya hubungan yang bersifat vertikal, yakni hubungan antara pihak penguasa pemerintahan dengan pihak pemegang kedaulatan (rakyat). Interaksi asosiatif dan disosiatif yang dikemukakan oleh Gillin diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam memahami permasalahan khususnya masalah hubungan vertikal (seperti pemerintah dengan masyarakat) dan teori ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mengidentifikasi masalah dan solusi yang bisa ditawarkan. Khususnya pada teori

interaksi disosiatif, meskipun teori tersebut mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan disosiatif, penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji kembali penyebab apa saja yang berpotensi menimbulkan tindakan disosiatif, gejala apa saja yang ditimbulkan serta pencegahan atau solusi yang dapat ditawarkan dari tindakan tersebut.

2. Secara praktis

Bagi pemerintah kota Bukittinggi, agar bisa memikirkan kembali ketika ingin membuat kebijaksanaan, misalnya dalam program pembangunan awning, memang pemerintah menggunakan pendekatan ekonomi dan berniat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, namun seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek sosio-kultural. Dapat diketahui masyarakat Minangkabau masih menjunjung budaya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dimana dalam menjalankan pemerintahan di negeri ini para aktor tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan aturan adat masyarakat.

Maka dari itu pihak DPRD menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian-kajian secara komprehensif terlebih dahulu, tidak hanya kajian teknis melainkan kajian sosio-kultural. Misalnya mengenai konsep *medan nan bapaneh*, terdapat sedikit gesekan penafsiran antara pemerintah dengan masyarakat, lalu perbedaan penilaian mengenai konsep sosialisasi dan persetujuan. Hal-hal demikian memang terlihat kecil namun nyatanya memiliki dampak yang besar bagi kelanjutan pembangunan.

Bagi seluruh pihak baik pihak pemerintah dengan masyarakat ataupun antar masyarakat, agar selalu mengutamakan komunikasi dan koordinasi apalagi ketika

hendak melakukan kebijaksanaan yang memiliki dampak bagi pihak lainnya. Adanya miskomunikasi akan berpotensi menciptakan kesalahpahaman, desas-desus hingga konflik/pertentangan. Ketika pertentangan sudah terjadi khususnya antara pemerintah dengan masyarakat dan tidak ditemui jalan tengahnya, maka otomatis rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan berkurang dan wibawa pemerintah yang akan dipertaruhkan di kemudian hari.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran mengenai pentingnya upaya akomodasi ketika terdapat gejolak-gejolak yang berpotensi memecah antar masyarakat, seperti potensi terjadinya kontravensi hingga konflik/pertentangan. Terakhir peneliti menyarankan ketika pemerintah ingin merencanakan pembangunan agar selalu melakukan kajian/riset yang mendalam serta melibatkan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang yang sesuai.

